

BAB II

PERALIHAN DARI AKRI MENJADI POLRI PADA MASA ORDE BARU

A. Sejarah Kepolisian Pra Orde Baru

Kepolisian di Indonesia mempunyai sejarah yang sangat panjang dan sudah ada sejak dahulu, yaitu sejak jaman pendudukan Hindia Belanda maupun masa pendudukan Jepang. Lembaga Kepolisian pada masa Penjajahan Hindia Belanda awalnya hanya beranggotakan orang-orang kulit putih saja. Berdirinya lembaga Kepolisian pada waktu itu disebabkan oleh adanya rasa takut dan kepedulian masyarakat Eropa yang tinggal di Indonesia. Rasa takut ini disebabkan oleh banyaknya pencurian, perampokan dan pembunuhan yang menimpa orang Eropa dan pejabat Pribumi.¹

Kepolisian zaman Hindia Belanda² mengalami beberapa reorganisasi. Pada tahun 1912, dibentuk Polisi bersenjata (*Gewapende Politie*) yang bersifat militer, bertugas sebagai pasukan cadangan khusus untuk memadamkan huru-hara. Pasukan Polisi Bersenjata ditempatkan di bawah Departemen Dalam Negeri.

Tahun 1916, dibentuklah Badan Intelejen Polisi (*Politieke Inlichtingen Dienst/PID*) ditempatkan di bawah Jaksa Agung yang bertugas mengumpulkan informasi mengenai partai politik, pribadi-pribadi dan membuat penilaian tentang situasi politik masyarakat kemudian dilaporkan kepada atasannya. Pada tahun 1920, Polisi bersenjata dibubarkan dan diganti oleh Polisi Lapangan (*Veld Politie*)

¹ Marieke Bloembergen, *Polisi Zaman Hindia Belanda, dari Ketakutan dan Kepedulian*, Jakarta: Kompas, hlm. 30.

² Lihat lampiran 10 daftar gambar , hlm. 135.

hal tersebut disebabkan para anggotanya tidak terdidik secara khusus dalam melakukan penyelidikan sehingga tidak cakap melakukan tugasnya, kurang berhasil dalam mengamankan daerah-daerah luar kota.

Kebijakan pemerintah Hindia Belanda terhadap polisi bangsa Belanda berbeda dengan polisi pribumi. Perbedaan tersebut ialah bahwa polisi pribumi tidak diperkenankan menjabat *hood agent* (bintara), *inspekteur van politie*, dan *commisaris van politie*. Jabatan polisi pribumi hanya sebatas mantri polisi, asisten wedana, dan wedana polisi. Lembaga kepolisian pada masa Hindia Belanda mempunyai bermacam-macam bentuk seperti: *veld politie* (polisi lapangan), *standspolitie* (polisi kota), *bestuurspolitie* (polisi pamong praja), *gewapende politie* (polisi bersenjata) dan *cultuur politie* (polisi pertanian).³

Beberapa tingkatan kedudukan atau jabatan yang terdapat dikalangan Kepolisian pada masa penjajahan Belanda adalah sebagai berikut.

1. *Hoofd Commissaris van Politie* (Komisaris Polisi Besar).
2. *Commissaris van Politie 1 ste Klasse* (Komisaris Polisi Kelas Satu).
3. *Commissaris van Politie 2 de Klasse* (Komisaris Polisi Kelas Dua).
4. *Hoofd Inspecteur van Politie* (Kepala Inspektur Polisi).
5. *Inspecteur van Politie 1 ste Klasse* (Inspektur Polisi Kelas satu).
6. *Inspecteur van Politie 2 de Klasse* (Inspektur Polisi Kelas dua).
7. *Wedana Bij de Algemeene Politie* (Wedana pada Polisi Umum).

³ Awaloedin Djamin, “Struktur Kelembagaan dan Professionalisme Polisi”, dalam Banurusman (Ed), *Polisi, Masyarakat dan Negara*, Yogyakarta: Bigrاف Pubilshing, 1995, hlm. 25.

8. *Assisten Wedana Bij de Algemeene Politie* (Asisten Wedana pada Polisi Umum).
9. *Mantri Politie 1 ste Klasse* (Mantri Polisi Kelas satu) dan *Hoofdpost huiscommandant 1 ste Klasse* (Komandan Pos Polisi Kelas satu).
10. *Mantri Politie* (Mantri Polisi).
11. *Hoofdagent 1 ste Klasse* (Agen Kepala Kelas satu) dan *Hoofdrechercheur 1 ste Klasse* (Penyidik Kepala Kelas satu).
12. *Hoofdagent 2 de Klasse* (Agen Kepala Kelas dua) dan *Hoofdrechercheur 2 de Klasse* (Penyidik Kepala Kelas dua).
13. *Hoofdposthuiscommandant 2 de Klasse* (Komandan Pos Polisi Kelas dua).
14. *Rechercheur 1 ste Klasse* (Penyidik Kelas satu) dan *Leerling* (Penyidik Siswa)⁴

Kepolisian pada zaman Pemerintahan Jepang⁵ (1942-1945) melakukan reorganisasi secara regional oleh Imamura Hitosi. Masing-masing kepolisian mempunyai kedudukan yang sesuai dengan kebijakan Pemerintah militer Jepang seperti: Jakarta adalah pusat kedudukan kepolisian bagi daerah Jawa dan Madura, Bukit Tinggi adalah pusat kedudukan kepolisian bagi daerah Sumatra, Makasar adalah pusat kedudukan kepolisian bagi daerah Timur Besar, Banjarmasin adalah pusat kedudukan bagi daerah Kalimantan.⁶

⁴Harsja W. Bachtiar, *Ilmu Kepolisian Suatu Cabang Ilmu Pengetahuan yang Baru*, Jakarta: Grasindo, 1994, hlm. 40.

⁵ Lihat lampiran 10 daftar gambar, hlm. 136.

⁶M, Oudang, *Perkembangan Kepolisian di Indonesia*, Jakarta: Markas Besar Kepolisian RI, 1952, hlm. 23.

Zaman Jepang jabatan dan pangkat perwira (setingkat *Inspecteur* dan *Commesaris*) banyak yang diserahkan kepada bangsa Indonesia hal ini dikarenakan kekurangan tenaga yang tersedia. Kepolisian di zaman Jepang juga mempunyai departemen sendiri yaitu *Keimubu* (Departemen Kepolisian).⁷ Tiap-tiap kantor polisi di daerah meskipun dikepalai oleh seorang pejabat kepolisian bangsa Indonesia, tapi selalu didampingi oleh pejabat Jepang (*sidookaan*) yang dalam praktek lebih berkuasa dari kepala polisi. Pembentukan *Keimubu* yang berdiri sendiri, hal ini membuat lembaga Kepolisian tidak lagi berada di bawah Departemen Dalam Negeri dan Departemen Kehakiman.⁸

Kepolisian Negara RI pada awal kemerdekaan mempunyai kesamaan dengan Lembaga Kepolisian zaman Hindia Belanda yaitu bersifat sentralisasi.⁹ Beberapa hal yang membuktikan bahwa Kepolisian Indonesia mempunyai kesamaan dengan Kepolisian zaman Belanda, yaitu adanya kesamaan aturan-aturan dalam pelaksanaan tugas-tugas Kepolisian seperti.

⁷Awaloedin Djamin, *loc.cit.*

⁸G. Ambar Wulan, *Polisi dan Politik: Intelejen Kepolisian pada Masa Revolusi Tahun 1945-1949*, Jakarta: Rajawali Press, 2009, hlm. 80.

⁹ Di Hindia Belanda Lembaga Kepolisian termasuk lingkup kerja Departemen pemerintah. Masuknya Kepolisian kedalam lingkup Kementrian Dalam Negeri menjadikan institusi tersebut mempunyai kedudukan sama dengan Dinas Polisi umum (*Anglemeene Politie*) dan Pemerintahan Hindia Belanda. Dalam hal ini kedudukan Kepolisian berada dalam lingkungan Kementrian Dalam Negeri, tetapi secara oprasional berada dibawah Jaksa Agung serta Pemerintah Daerah. Menurut maklumat tanggal 19 Agustus 1945, Kejaksaan dimasukkan kedalam Kementrian Kehakiman, tetapi Jaksa Agung masih memiliki peran yang sama seperti pada masa Pemerintahan Hindia Belanda yaitu sebagai *Procoureur General* dengan tugas menjadi polisi *peventif dan reprsif*. (Koesnodiprojo, *Himpunan UU, Peraturan – Peraturan, Penetapan – Penetapan Pemerintah RI 1945-1949*, Jakarta: SK Seno, 1951, hlm. 49).

- a. *Staatsblad* 1918 No. 125 (Lembaga Hukum Peraturan Kepolisian)
- b. *Staatsblad* 1918 No. 126 (Lembaga Hukum Kepolisian melacak kasus pidana)
- c. *Staatsblad* 1941 No. 44 (HIR = *Herziene Inlandch Reglement*).¹⁰

Baru pada tanggal 1 Juli 1946 diadakan reorganisasi Kepolisian yang tertuang dalam Penetapan Pemerintah No II/SD/1946, merupakan suatu momentum pembentukan Kepolisian Nasional.¹¹ Tanggal 1 Juli 1946 disebut sebagai hari lahirnya Kepolisian Nasional Indonesia, atau sering disebut sebagai Hari Bhayangkara.

¹⁰*Regulation* tertanggal 11 Februari 1814, yang dikeluarkan oleh Raffles untuk memperbaiki pemerintahan di dalam negeri kemudian menjadi dasar bagi penyusunan suatu *Inlandsch Reglement*, yang pada tahun 1941 diubah menjadi *Herziene Inlandsch Reglement* (Indonesia yang diperbaharui). *Reglement* ini hingga Republik Indonesia masih dipergunakan sebagai pedoman bagi penyelenggaraan pemerintahan dan bagi acara pidana. Dari *Reglement* Indonesia yang diperbaharui tercermin dari tujuan adanya institusi polisi ketika zaman Hindia Belanda, diantaranya:

- a. pengamanan dan lembaga-lembaga terhadap semua bahaya dan gangguan, terkecuali yang berasal dari musuh luar negeri;
 - b. pengurusan ketertiban dan keamanan umum;
 - c. pengawasan terhadap perkumpulan-perkumpulan dan rapat-rapat;
 - d. membantu pengadilan dalam mengangkut tahanan, penangkapan tersangka dan mereka yang dapat keputusan hakim, dan seterusnya.
- (Soeparno, *Sejarah Perkembangan Kepolisian dari Zaman Klasik– Modern*, Jakarta: Pusat Sejarah ABRI, 1871, hlm. 61.)

¹¹Isi Penetapan Pemerintah No. 11/SD Tahun 1946 Persiden Repoeblik Indonesia, Mengingat akan Oesoelan Dewan Mentri, Memoetoeskan:

1. Djawatan Kepolisian, jang sekarang masoek dalang lingkongan Kementrian Dalam Negeri, dikeloearkan dari lingkongan terseboet dan didjadikan djawatan jang langsoeng di bawah pimpinan Perdana Mentri.
2. Penetapan ini moelai berlakoe pada tanggal 1 Djoeli 1946. Ditetapan di Jogjakarta, tamggal 25 Djoeni 1946, oleh Periden Repoeblik Indonesia Soekarno (Koesnodiprodjo, *op.cit.*, hlm. 290.)

Pada tanggal 1 Agustus 1947, menurut Penetapan Dewan Pertahanan Negara No 112, Kepolisian Negara mempunyai kedudukan sebagai tentara yaitu selain bekerja sebagai penjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat, namun demikian polisi juga ikut berperang bersama kekuatan bersenjata seperti AD, AL dan AU untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia yang baru saja diraih, dibawah Kementrian Pertahanan.¹² Adapun ketentuan-ketentuan umum tentang Kepolisian sebagai alat revolusioner yaitu:

- a. Kepolisian Negara RI, selanjutnya disebut Polisi Negara, ialah alat negara penegak hukum yang terutama bertugas memelihara keamanan dalam negeri.
- b. Kepolisian Negara dalam menjalankan tugas-tugasnya selalu menjunjung tinggi hak-hak azasi rakyat dan hukum negara.¹³

Pada tanggal 19 Agustus 1945, dibentuklah BKN (Badan Kepolisian Nasional). Kemudian pada tanggal 29 September 1945, Presiden Republik Indonesia Soekarno melantik Kepala Polisi (Kapolri) pusat yang pertama yaitu Jenderal Polisi RS Soekanto.

Pada waktu menjadi Republik Indonesia Serikat (RIS), maka pada tanggal 19 Januari 1950, *Dienst der Algemeene Politie In Nederlandsc – Indieh* (Dinas Polisi umum di Hindia Belanda) di ambil alih oleh pejabat pemerintahan RI dan dijadikan jawatan Kepolisian (RIS) dan R.S. Sukanto diangkat sebagai

¹²Koesparmono Irsan, “Inovasi Struktur Kelembagaan dalam Menciptakan Profesionalisme POLRI”, dalam Banurusman (Ed), *Polisi, Masyarakat dan Negara*, Yogyakarta: Bigraf Pubilshing, 1995, hlm. 12.

¹³D.N. Aidit, *PKI dan Polisi*, Jakarta: Yayasan Pembaharuan, 1963, hlm. 14 –15.

Kepala Jawatan Kepolisian Negara RIS dan R. Sumanto diangkat sebagai Kepala Kepolisian Negara RI berkedudukan di Yogyakarta.¹⁴

Surat Perintah 11 Maret 1966 dianggap sebagai tonggak permulaan Orde Baru. Selanjutnya karena pengalaman yang pahit dari peristiwa G30S/PKI yang mencerminkan tidak adanya integrasi antar unsur-unsur ABRI, maka untuk meningkatkan integrasi ABRI, tahun 1967 dengan SK Presiden No. 132/1967 tanggal 24 Agustus 1967 ditetapkan Pokok-Pokok Organisasi dan Prosedur Bidang Pertahanan dan Keamanan yang menyatakan ABRI merupakan bagian dari organisasi Departemen HANKAM meliputi AD, AL, AU, dan AK yang masing-masing dipimpin oleh Panglima Angkatan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewajibannya kepada MENHANKAM/PANGAB.¹⁵

B. Latar Belakang Angkatan Kepolisian beralih menjadi POLRI

Pada masa pemerintahan Orde Baru, Presiden Soeharto melakukan perubahan dengan meletakkan lembaga-lembaga tinggi Negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 dan mengabdikan kepada kepentingan nasional yang dilandasi falsafah Pancasila. Perubahan selanjutnya yang dilakukan Presiden Soeharto, yaitu perubahan pada lembaga Kepolisian, dengan melakukan peralihan nama, kedudukan dan tanggungjawab Angkatan Kepolisian menjadi POLRI.

Pada tanggal 1 Juli 1968, dalam peringatan hari Bhayangkara, Presiden Soeharto menekankan agar polisi kembali pada fungsinya sebagai lembaga

¹⁴Harsja W. Bachtiar, *op.cit.*, hlm. 50.

¹⁵ M, Oudang, *op.cit.*, hlm. 45.

Kepolisian seutuhnya. Peralihan ini terjadi berdasarkan pada ketentuan pokok Kepolisian dalam Undang-undang No. 13 tahun 1961, pasal 1 dan 2, yang berisi sebagai berikut.

Pasal 1 ayat (1) dan (2).

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut Kepolisian Negara , ialah alat Negara Penegak Hukum yang terutama bertugas memelihara keamanan di dalam negeri.
2. Kepolisian dalam menjalankan tugasnya selalu menjunjung tinggi hak-hak azasi rakyat dan hukum Negara.

Pasal 2, dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam pasal 1, maka Kepolisian Negara mempunyai tugas sebagai berikut.

- a.
 1. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
 2. Mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit-penyakit masyarakat.
 3. Memelihara keselamatan Negara terhadap gangguan dari dalam.
 4. Memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat, termasuk memberi perlindungan dan pertolongan.
 5. Mengusahakan ketaatan Warga Negara dan masyarakat terhadap peraturan-peraturan Negara.
- b. Dalam bidang peradilan mengadakan penyidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan lain-lain Peraturan Negara.

- c. Mengawasi aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara.
- d. Melaksanakan tugas-tugas khusus lain yang diberikan kepadanya oleh suatu peraturan Negara.¹⁶

Penyebab terjadinya peralihan berikutnya adalah adanya Keputusan Presiden No. 52 tahun 1969, yang menyebutkan bahwa nama AKRI diubah menjadi POLRI, hal ini dikarenakan sebagai berikut.

1. Bahwa menimbang antara upaya dan tujuan yang dapat menjamin hasil yang optimal dalam melaksanakan tugas pokok Kepolisian Negara perlu diserasikan.
2. Bahwa oleh karena Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 290 tahun 1964 (disempurnakan) tentang penegasan kedudukan, tugas dan tanggung jawab Angkatan Kepolisian Republik Indonesia sebagai unsure Angkatan Bersenjata perlu disesuaikan dengan proses perkembangan Angkatan Bersenjata, sehingga untuk memberikan ruang gerak yang cukup bagi usaha penyerasian yang dimaksud, dengan mengingat pada Undang-undang No. 13 tahun 1961 tentang ketentuan-ketentuan pokok Kepolisian Negara dan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 132 tahun 1967, dan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 171 tahun 1967.¹⁷

Oleh sebab itu dalam bidang pendidikan Kepolisian pun berubah yang sebelumnya bersifat militeristik hal ini dikarenakan pendidikan POLRI pada

¹⁶ Koesparmono Irsan, *op.cit.*, hlm. 14.

¹⁷ Lihat Lampiran 4, “Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 52 Tahun 1969”, hlm. 125.

awalnya disatukan dengan ABRI yang berada dibawah Pangap, sejak rekrutmen hingga penyaringan calon anggota polisi di lakukan di Kodam (Komando Daerah Militer), selanjutnya bagi yang lulus di latih bersama ABRI selama satu tahun di AKABRI. Selanjutnya dimasukkan kedalam Akademi Angkatan masing-masing. Materi pendidikan Akpol (Akademi Polisi) terdiri dari:

- a. Mental kejuangan, filsafah dan tradisi.
- b. Fungsi teknis Kepolisian; profesi dan teknologi.
- c. Ilmu sosial dan ekonomi, psikologi, administrasi Negara, ilmu Kepolisian dan Administrasi Kepolisian.
- d. Hukum pidana, perdata dan islam.
- e. Pengetahuan logistik dan personel.¹⁸

Menurut Keputusan Presiden No.79 tahun 1969, disebut bahwa ABRI merupakan unsur organik Departemen HANKAM yang merupakan kekuatan HANKAMPAS dan Kekuatan sosial dalam pasal-pasal disebutkan bahwa adanya perbedaan tugas dan kewajiban antara APRI (Angkatan Perang Republik Indonesia)¹⁹ dengan POLRI. Pendekatan sosial dan keamanan dalam negeri merupakan unsur POLRI sesuai dengan UU Pokok Kepolisian No. 13 tahun 1961.

¹⁸Erma Yulihastin, *Bekerja sebagai Polisi*, Jakarta: Erlangga, 2008, hlm. 13.

¹⁹Sebelum adanya penggabungan antara TNI dengan Kepolisian, angkatan perang Indonesia di kenal dengan nama APRI (Angkatan Perang Republik Indonesia). Setelah adanya penggabungan maka berubah nama menjadi ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) nama maupun struktur dalam ABRI bertahan sampai akhir Orde Baru. Pada masa Reformasi dilakukan pemisahan antara TNI dengan polisi untuk mengembalikan profesionalitas masing-masing angkatan.

Keppres No. 79 tahun 1969, tanggal 5 Oktober 1969, merupakan penyempurnaan dari Keppres No. 132/1967, merupakan penegasan lebih lanjut tentang tugas dan tanggung jawab POLRI. Keppres No. 132/1967 tidak mengandung penegasan tugas pokok dan fungsi POLRI sebagai Penegak Hukum dan penanggung jawab kamtibmas, sedang dalam Keppres No. 79/1969, tugas dan tanggung jawab POLRI dinyatakan sebagai berikut.

- a. POLRI bertugas dan bertanggung jawab sebagai alat Negara Penegak Hukum terutama di bidang Kamtibmas, sesuai Undang-Undang No. 13/1961 dan Keppres 52/1969 (Pasal 37 ayat 1).
- b. Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut (Pasal 37 ayat 1) POLRI berkewajiban mendukung kebijaksanaan HANKAMNAS dengan menyelenggarakan pembinaan terhadap kegiatan-kegiatan POLRI di bidang-bidang yang diperlukan guna pelaksanaan tugas Kepolisian (Pasal 37 ayat 2).
- c. POLRI dapat diberi tugas khusus, partisipasi dalam kegiatan Operasi Bhakti dan Kekaryaan ABRI sesuai dengan ketentuan.²⁰

Status dan kedudukan POLRI ditegaskan lagi dalam Keppres No. 80/1969 tentang “ABRI sebagai bagian organik Departemen HANKAM beserta tugas dan tanggung jawabnya”. Pasal 1 Keppres dinyatakan bahwa AKRI yang merupakan bagian Organik Departemen Pertahanan dan Keamanan terdiri dari.

- a. Angkatan Perang Republik Indonesia disingkat (APRI) yang meliputi AD, AL, dan AU.

²⁰Dadi Rohaedi, “ Makna dan Hakekat Hari Bhayangkara ”, *Makalah*, Diskusi tentang sejarah lahirnya Lembaga Kepolisian, Jakarta: Museum POLRI, 2013, hlm. 14.

- b. Kepolisian Negara Republik Indonesia disingkat POLRI. Tugas POLRI tercantum dalam POLSTRA HANKAMNAS terutama dalam menunjang PELITA II.

C. Proses Peralihan dari AKRI Menjadi POLRI masa Orde Baru

Kita ketahui bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia lahir pada tanggal 1 Juli 1946, atau sering disebut hari Bhayangkara. Pada awalnya lembaga Kepolisian berada di bawah kendali Departemen Dalam Negeri, namun karena kewenangan Kepolisian yang sangat luas ini menjadi sangat terbatas serta mendapat kendala struktural dan operasionalnya. Lembaga Kepolisian akhirnya bertanggungjawab langsung di bawah Perdana Menteri yang sederajat dengan Kejaksaan dan Kehakiman Republik Indonesia²¹, dengan demikian struktur organisasinya juga mengalami perubahan.²²

Perjalanan sejarah perkembangan lembaga Kepolisian mengalami beberapa perubahan-perubahan status dan struktur organisasinya antara lain sebagai berikut.

Pada tahun 1947 dan 1948, saat itu Indonesia menghadapi situasi perang, lembaga Kepolisian saat itu selain bertugas sebagai penjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat, polisi juga masih ikut berperang bersama

²¹ Awaloedin Djamin, *Sejarah Perkembangan Kepolisian di Indonesia Dari Zaman Kuno Sampai Sekarang*, Jakarta: Yayasan Brata Bhakti POLRI, 2006, hlm 129.

²² Lihat Lampiran 7, Tentang Struktur Organisasi Polisi 1946, hlm. 131.

kekuatan bersenjata seperti AD, AL dan AU untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia yang baru saja diraih.²³

Menurut Penetapan Dewan Pertahanan Negara No 112 memerintahkan satuan Kepolisian Negara untuk dimiliterisasi, maka Kepolisian Negara mempunyai kedudukan sebagai tentara dan Kesatuan polisi diperintahkan kembali untuk menjalankan pekerjaan Tentara atas perintah Komando Tentara. Tugas-tugas kepolisian yang diatur dalam instruksi tersebut pada umumnya tetap seperti semula, hanya mengenai pengerahan tenaga-tenaga Kepolisian untuk tugas-tugas militer, Kepala Kepolisian Negara wajib memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada pimpinan tentara setempat, sebab penjagaan keamanan di luar garis pertempuran tidak boleh diabaikan dan tetap menjadi tanggungjawab Kepolisian. Kesatuan polisi yang dimiliterisasi beserta perlengkapannya secara taktis ditempatkan di bawah perintah komando militer setempat. Pangkat anggota Kepolisian Negara pun kemudian disesuaikan dengan pangkat ketentaraan.

Pada suatu penyidikan perkara, Kepolisian negara dapat pula menangkap anggota-anggota tentara untuk segera diserahkan kepada Komando Tentara yang

²³ Tahun 1947 dan 1948, Indonesia mengalami sebuah keadaan yang sangat genting, dimana pasukan Sekutu datang dengan dibonceng tentara NICA atau Belanda yang hendak menegakkan kembali kekuasaan kolonial Belanda di Indonesia. Pada tanggal 21 Juli 1947, Belanda mulai menyerang Indonesia, serangan ini disebut "Aksi Polisional". Tanggal 4 Agustus 1947, pemerintahan RI dan Belanda sepakat untuk mengadakan gencatan senjata yang berarti berakhirnya Agresi Belanda I. Selanjutnya tanggal 18 September 1948, PKI mengumumkan berdirinya Pemerintahan Soviet Republik Indonesia, Pemerintah RI mengeluarkan pernyataan bahwa gerakan PKI Muso di Madiun adalah tidak sah dan harus ditumpas. Penumpasan PKI, di kota Madiun akan dislakukan dari arah barat dan dari arah Timur secara serentak. Pada tanggal 19 Desember 1948, Belanda kembali melakukan serangan ke Indonesia melalui udara guna menyerang kota Yogyakarta. Serangan tersebut mereka namakan "Operasi Gagak".

bersangkutan dengan disertai laporannya. Atas perintah komando tentara yang bersangkutan, kepolisian negara di suatu tempat, rapat dengan pasukan-pasukan tentara dalam hal melakukan perondaan. Untuk kepentingan pertahanan, DPN berhak memasukkan kepolisian negara, sebagian atau seluruhnya menjadi kesatuan tentara.

Fungsi kepolisian selanjutnya dalam pemerintahan negara bersifat *combatant*, karena kepolisian negara dalam keadaan tertentu, dapat jadi pelaksana fungsi pertahanan dari satu kesatuan tentara untuk mempertahankan negara dari segala bentuk gangguan dan keamanan yang terjadi ketika itu, sesuai dengan perkembangan fungsi negara dalam menjalankan fungsi kepolisian untuk kepentingan pertahanan negara.

Masuknya Kesatuan Polisi sebagai “Tentara” juga terdapat dalam “Catatan Mengenai Posisi Kepolisian di Indonesia” yang berupa: (...) dengan tidak mengusik bentuk Kepolisian sebagai aparatur Negara yang berupa “Tentara”, akan tetapi soal:

- a. penetapan beleid
- b. " aksi
- c. Tjara melakukan aksi harus sesuai dengan keadaan Republik sebagai Negara demokrasi dan harus mengingat pada effective jang sebesar-besarnya (...).²⁴

Setelah diadakan perundingan antara delegasi RI dan delegasi Belanda dan ditandatanganinya Konferensi Meja Bundar (KMB) pada tanggal 2 Nopember

²⁴ Lihat Lampiran 5 “Beberapa catatan mengenai posisi Kepolisian di Indonesia,” hlm. 128.

1949, di Den Haag mengharuskan Belanda harus keluar dari wilayah Indonesia dan Indonesia menjadi negara federal dengan nama Republik Indonesia Serikat (RIS) pada tahun 1950. Keppres RIS No. 22 tahun 1950 dinyatakan bahwa Jawatan Kepolisian RIS dalam kebijaksanaan politik polisional berada di bawah perdana menteri dengan perantaraan jaksa agung, sedangkan dalam hal administrasi pembinaan, dipertanggungjawabkan pada Menteri Dalam Negeri.

Pada masa RIS, Indonesia terbagi menjadi 16 negara bagian, hal ini juga berpengaruh pada lembaga Kepolisian, maka POLRI juga mengalami perubahan menjadi Kepolisian Federal, pimpinan Kepolisian Negara diserahkan kepada Menteri Pertahanan, berdasarkan Ketetapan Perdana Menteri Nomor . 03/PM/1950. Kemudian dicabut kembali pada bulan September 1950. Namun demikian RIS juga tidak berusia lama karena banyak negara bagian ingin menggabungkan diri dengan RI,²⁵ sebelum dibentuk Negara Kesatuan RI pada tanggal 17 Agustus 1950, pada tanggal 7 Juni 1950, dengan Tap Presiden RIS No. 150, organisasi – organisasi Kepolisian negara-negara bagian disatukan dalam Jawatan Kepolisian Indonesia.

Baru pada tanggal 17 Agustus 1950 seluruh negara bagian dibubarkan dan Indonesia kembali menjadi Negara kesatuan, Polisi Negara Republik Indonesia juga dilebur menjadi satu kesatuan dan berpusat di Jakarta. Pada tanggal 9 Januari 1952, Kepala Kepolisian mengeluarkan surat perintah yang kemudian menjadi dasar pembentukan satuan-satuan khusus seperti: polisi Perairan, polisi udara dan

²⁵ Dadi Rohaedi, “ Kepolisian Negara RI 1945 – Sekarang”, *Makalah*, Diskusi tentang sejarah lahirnya Lembaga Kepolisian, Jakarta: Museum POLRI, 2013, hlm. 89.

lalulintas. Setiap daerah, satuan khusus ini diletakkan di dalam bagian organisasi polisi.²⁶

Tahun 1954 dibentuk Panitia Negara Perancang UU Kepolisian Negara, berdasarkan KepPres Nomor : 297/1954. Walaupun POLRI adalah bagian dari ABRI, namun tugas pokok dan fungsinya berbeda dengan Angkatan Perang. Semenjak tanggal 1 Juli 1955, Kepala Negara meresmikan “ Tri Brata dan Catur Prasetya ” sebagai pedoman hidup dan pedoman karya Kepolisian Republik Indonesia dan oleh sebab itu menjadi kode etik profesi Kepolisian Indonesia. Adapun bunyi “ Tri Brata ” adalah sebagai berikut.

1. *Rastra Swakottama* (abdi utama nusa dan bangsa).
2. *Negara Yanottama* (warga negara utama negara).
3. *Yana Anucasaradharma* (wajib menjaga ketertiban pribadi rakyat).²⁷

Adapun maksud yang terkandung dari setiap Brata sebagai Pedoman Hidup Kepolisian adalah sebagai berikut.

1. Brata pertama, *Rastra Swakottama* (abdi utama nusa dan bangsa) mempunyai maksud sebagai berikut.
 - a. Mengabdikan kepada nusa dan bangsa dengan penuh ketakwaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 - b. Berbakti demi keagungan nusa dan bangsa yang bersendikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai kehormatan yang tertinggi.

²⁶ Erma Yulihastin, *op,cit.*, hlm. 11.

²⁷ Awaloedin Djamin, *op,cit.*, hlm. 27.

- c. Membela tanah air, mengamankan dan mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
 - d. Menegakkan hukum dan menghormati kaedah-kaedah yang hidup dalam masyarakat secara adil dan bijaksana.
 - e. Melindungi, mengayomi,serta mambimbing masyarakat sebagai wujud panggilan tugas pengabdian yang luhur.
2. Brata kedua, *Negara Yanottama* (warga negara utama negara) mempunyai maksud sebagai berikut.
- a. Berdarma untuk menjamin ketentraman umum bersama-sama warga masyarakat membina ketertiban demi terwujudnya kegairahan kerja dan kesejahteraan lahir batin.
 - b. Menampilkan dirinya sebagai warga Negara berwibawa dan dicintai oleh semua warga negara.
 - c. Menampilkan disiplin, percaya diri dan tanggungjawab penuh keikhlasan terhadap tugas.
 - d. Selalu peka dan tanggap dalam tugas, mengembangkan kemampuan dirinya, menilai tinggi mutu kerja penuh keaktifan dan efisien serta menempatkan kepentingan tugas secara wajar di atas kepentingan pribadinya.
 - e. Memupuk rasa persatuan, kesatuan dan bersama serta kesetiakawanan dalam lingkungan tugasnya maupun dalam lingkungan masyarakat.
 - f. Menjauhkan diri dari sikap dan perbuatan tercela serta memelopori setiap tindakan, mengatasi kesulitan-kesulitan masyarakat sekelilingnya.

3. Brata ketiga, *Yana Anucasaradharma* (wajib menjaga ketertiban pribadi rakyat) mempunyai maksud sebagai berikut.
 - a. Selalu waspada, siap sedia dan sanggup menghadapi setiap kemungkinan dalam tugasnya.
 - b. Mampu mengendalikan diri dari perbuatan-perbuatan menyalahgunakan wewenang.
 - c. Tidak mengenal berhenti dalam memberantas kejahatan dan mendahulukan cara-cara pencegahan dari pada penindakan secara hukum.
 - d. Memelihara dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat.
 - e. Berasama-sama dengan komponen kekuatan pertahanan lainnya dan peran serta masyarakat, memelihara dan meningkatkan kebersamaan dengan masyarakat.
 - f. Meletakkan setiap langkah tugas sebagai bagian dari pencapaian tujuan pembangunan nasional sesuai dengan amanat penderitaan masyarakat.²⁸

Kepolisian Negara ditunjuk untuk mewakili Pemerintah Indonesia dalam InterPol berdasarkan keputusan Perdana Menteri Nomor : 245/PM/1954. Dekrit Presiden 5 Juli 1959, dan setelah kegagalan Konstituante, Indonesia kembali ke UUD 1945. Jabatan Perdana Menteri Ir. Djuanda diganti dengan sebutan Menteri Pertama, maka RS Seokanto memperoleh kedudukan sebagai Menteri Muda Kepolisian RI. Kedudukan POLRI masih tetap di bawah Menteri Pertama sampai

²⁸ R Abdussalam, *Hukum Kepolisian, Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum yang Telah Direvisi*, Jakarta: Restu Agung, 2009, hlm. 49-50.

keluarnya Keputusan Presiden No. 153/1959, di mana Kepala Kepolisian Negara diberi kedudukan Menteri Negara. Menurut Keputusan Presiden No 154/1959 tanggal 10 Juli 1959, berisi tentang Kepolisian Negara dimasukkan dalam Bidang Keamanan/Pertahanan yang dikepalai oleh Menteri Muda Kepolisian/KKN Said Soekanto Tjokrodiatmojo. Tanggal 26 Agustus 1959, menurut surat edaran Menteri Pertama (Menpama) No.1/MP/RI/1959, berisi tentang pergantian nama dari nama Kementrian diganti dengan Departemen, sehingga Djawatan Kepolisian Negara diganti menjadi Departemen Kepolisian Menteri/ KKN.

Pada tanggal 1 Juli 1960 secara resmi Catur Prasetya diberlakukan sebagai Pedoman Karya. Catur berarti empat, prasetya berarti janji, dengan demikian Catur Prasetya adalah empat janji yaitu sebagai berikut.

1. *Setyakaprabu*, berarti setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke.
2. *Hanieken musuh*, berarti meniadakan musuh-musuh negara baik dari luar maupun dari dalam negeri.
3. *Tansatrisna*, berarti tidak boleh terikat sesuatu atau trisna, hanya lebih mendahulukan kepentingan masyarakat, Bangsa dan Negara.
4. *Ginung pratidina*, berarti setiap saat selalu mengagung-agungkan negara, sehingga negara semakin Tata-Tentrem-Raharja dan semakin jaya.²⁹

Pada tahun yang sama juga terjadi perubahan pada status Kepolisian menjadi angkatan bersenjata menurut Ketetapan MPRS No.11/MPRS/1960, berisi tentang dimasukkannya Departemen Kepolisian ke dalam Bidang Keamanan

²⁹ *Ibid*, hlm. 51.

Nasional, bersama dengan AD, AL dan AU. Sebagai penjabaran TAP MPRS tahun 1960 yang menyatakan bahwa polisi adalah bagian dari Angkatan Bersenjata RI, maka dibentuklah Undang-undang Kepolisian yaitu Undang-Undang No.13 tahun 1961, yang berisi tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian Negara RI. Dalam UU ini dinyatakan bahwa kedudukan POLRI sebagai salah satu unsur ABRI yang sama sederajat dengan TNI AD, AL, dan AU.

Menurut Keppres No. 94/1962, Menteri Kapolri, Menteri/KASAD, Menteri/KASAL, Menteri/KSAU, Menteri/Jaksa Agung, Menteri Urusan Veteran dikoordinasikan oleh Wakil Menteri Pertama bidang pertahanan keamanan. Peraturan Menteri /KASAK/No. 2/PRT/ MK/1962, yaitu tanggal 11 November 1962, Kepolisian Negara diubah menjadi AKRI dengan disertai perubahan susunan dan pola organisasinya serta dalam Keputusan Presiden RI No. 134/1962,³⁰ pada tanggal 12 April 1962 maka Menteri/Kepala Kepolisian Negara sebagaimana tercantum dalam dictum “Pertama angka III.4” Keputusan Presiden No 94 tahun 1962, diubah menjadi Menteri/Kepala Staf Angkatan Kepolisian Negara dipimpin oleh Djenderal Polisi R. Soekarno Djojonagoro, dan polisi disesuaikan kedudukannya sebagai angkatan bersenjata. Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkannya hingga tanggal 5 Maret 1962.³¹

Keputusan Presiden No. 290/1964, yaitu pada tanggal 12 November 1964, memutuskan dalam pasal 1 adalah sebagai berikut.

³⁰ Memet Tanumidjaja, *Sejarah Perkembangan Angkatan Kepolisian*, Jakarta: Pusat Sejarah ABRI, 1971, hlm. 121–122.

³¹ Lihat Lampiran 1 “Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 134 Tahun 1962,” hlm. 107.

1. Angkatan Kepolisian Republik Indonesia adalah anggota Angkatan Bersenjata.
2. Kedudukan Angkatan Kepolisian Republik Indonesia sebagai anggota Angkatan Bersenjata adalah sederajat dengan ketiga Angkatan yang lainnya.
3. Sebagai bagian dari Angkatan Bersenjata, maka Angkatan Kepolisian Republik Indonesia seperti halnya dengan ketiga Angkatan lainnya merupakan suatu kesatuan dengan garis-garis yang hierarki dan komando yang utuh dan bulat.³²

Keputusan tersebut selanjutnya disempurnakan ke dalam Kepres RI No. 290, tahun 1964, pasal 2 yang menyatakan bahwa Angkatan Kepolisian Republik Indonesia bertugas serta bertanggungjawab sebagai berikut.

1. Sebagai alat negara penegak hukum, terutama dibidang pemeliharaan Keamanan Dalam Negeri sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Pokok Kepolisian.
2. Mengkoordinir dan mengawasi alat-alat Kepolisian khusus dalam melaksanakan tugas Kepolisian dibidang masing-masing sesuai dengan ketentuan- ketentuan dalam Keputusan Presiden No. 372 tahun 1962.
3. Ikut serta secara fisik didalam pertahanan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang Pokok Kepolisian.

³²Lihat Lampiran 2 “Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 290 Tahun 1964,” hlm. 108.

4. Menyelenggarakan pembinaan masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas Kepolisian dan pembinaan wilayah sesuai dengan doktrin Angkatan Bersenjata, dengan tujuan untuk mencapai dan memelihara keamanan.
5. Ikut serta dalam proses produksi dan distribusi (operasi kerja).
6. Sebagai alat revolusi umumnya dalam bidang hidup kenegaraan dan hidup kemasyarakatan.³³

AKRI berintegrasi penuh dengan ABRI, dan Kepalanya disebut Panglima Angkatan Kepolisian (PANGAK), keputusan ini tertera dalam Keputusan Presiden No. 290 tahun 1964, pasal 3, bahwa kedudukan hukum, personel materiil, keuangan, organisasi, administrasi dan perawatan AKRI di atur secara umum dan terintegrasi dengan ketiga Angkatan lainnya,³⁴ penegasan kedudukan, tugas dan tanggung jawab POLRI sebagai unsur ABRI adalah sebagai berikut.

- a. Alat Negara Penegak Hukum.
- b. Koordinator Polsus.
- c. Ikut serta dalam pertahanan.
- d. Pembinaan Kamtibmas.
- e. Kekaryaan.
- f. Sebagai alat revolusi.

Selanjutnya dalam pasal 4, berbunyi selama peraturan-peraturan pokok yang sama bagi keempat Angkatan Bersenjata seperti dimaksudkan dalam pasal 3, maka dengan peraturan tersendiri ditentukan agar setahap demi setahap

³³ Lihat Lampiran 2, *op,cit.*, hlm. 113.

³⁴ Soeparno, *op,cit.*, hlm 380.

kedudukan Angkatan Kepolisian Republik Indonesia sebagai Angkatan Bersenjata dapat terwujud paling lambat pada tanggal 1 Januari 1965, Angkatan Kepolisian benar-benar telah terintegrasi dengan anggota-anggota Angkatan Bersenjata lainnya.

Tahun 1966, AKRI sebagai bagian dari ABRI dengan Matra Kamtibmas, berdasarkan Ketetapan MPRS Nomor : XXIV/1966. Selanjutnya menurut Keputusan Presiden No. 132 tahun 1967, tentang Pokok-pokok Organisasi dan Prosedur Bidang Pertahanan Keamanan, memutuskan pokok-pokok organisasi dan prosedur bidang HANKAM tertera dalam pasal 1 dan 2, adalah sebagai berikut.

Pasal 1, dalam rangka pemerintahan umum Negara Republik Indonesia, fungsi Pertahanan Keamanan, yang selanjutnya disingkat dengan HANKAM, merupakan salah satu fungsi pemerintahan Negara tertinggi yang khusus diajukan ke arah tercapainya keamanan Bangsa, Negara dan Revolusi Indonesia, baik dalam aspek nasional maupun dalam aspek internasional, yang dilaksanakan dalam Departemen HANKAM.

Pasal 2, untuk mencapai tujuan yang dimaksudkan dalam pasal 1, Departemen HANKAM bertugas pokok menyelenggarakan pengendalian tertinggi secara integratif-fungsional terhadap semua kegiatan-kegiatan Negara dan masyarakat untuk mengamankan Revolusi, mempertahankan Negara serta melindungi rakyat pada umumnya, dan secara koordinatif-struktural terhadap Angkatan-angkatan (AD, AL, AU dan AK) dan badan-badan HANKAM lainnya.

Pasal 26, c dan d, tentang Angkatan Bersenjata Republik Indonesia menyebutkan setiap Angkatan yang merupakan bagian organik dari Departemen HANKAM bertanggungjawab untuk memberikan bantuannya dalam menyelenggarakan dan pengamanan dibidang pertahanan dan keamanan yang telah diputuskan dan ditetapkan oleh DEPERTAN, dalam hal ini setiap Angkatan menyelenggarakan perencanaan dan pengawasan terhadap operasi-operasi dan usaha-usaha dari Angkatanannya masing-masing, termasuk dalam penyelenggaraan fungsi organisasi, latihan dan perlengkapan kesatuan Angkatanannya, sehingga mampu menyiapkan kesatuannya dalam rangka Komando gabungan yang disiagakan untuk kebutuhan operasi dan perang, meliputi bidang kesiapan, bantuan logistik dan administrasi sesuai dengan matra Angkatanannya.

Berikutnya bahwa Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebagai bagian dari Departemen HANKAM adalah sebagai berikut.

1. Angkatan Darat, selanjutnya disingkat AD.
2. Angkatan Laut, selanjutnya disingkat AL.
3. Angkatan Udara, selanjutnya disingkat AU.
4. Angkatan Kepolisian, selanjutnya disingkat AK.

Masing-masing Angkatan dipimpin oleh Panglima Angkatan.³⁵ Setiap Angkatan bertugas menyelenggarakan pembinaan Hamkamnas menurut mantranya masing-masing, dalam tubuh Angkatan Kepolisian struktur

³⁵ Lihat Lampiran 3 “Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 132 Tahun 1967,” hlm. 117 dan 120.

organisasinya juga berubah, sesuai dengan peraturan Menpangak tahun 1967.³⁶ Pemegang kekuasaan tertinggi ABRI adalah Presiden.

Tanggal 27 Juni 1969, menurut Keputusan Presiden No. 52 tahun 1969, tentang sebutan, kedudukan organik dan tanggung jawab Kepolisian Negara sebagai unsur Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dalam Departemen Pertahanan Keamanan, memutuskan, mencabut Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 290 tahun 1964, dengan kata lain sebutan AKRI (Angkatan Kepolisian Republik Indonesia) yang sejenis dengan AD, AL, dan AU yang masih sifat militer, diubah menjadi POLRI (Polisi Republik Indonesia).³⁷

Hal ini juga di jelaskan di dalam KePres RI No. 52 Tahun 1969, pasal 1 ayat (1 dan 2), pasal 3 dan pasal 5 yang berisi sebagai berikut: pasal 1, ayat (1)“ Dengan tidak mengurangi kedudukannya sebagai Angkatan Bersenjata seperti yang dimaksud dalam pasal 3 Undang-undang No. 13 tahun 1961 (LN. Tahun 1961 No. 245 ; TLN. No. 2289), digunakan kembali sebutan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disingkat Kepolisian Republik Indonesia, Ayat (2) Kepolisian Republik Indonesia berkedudukan organik dalam Departemen Pertahanan-Keamanaan ”.

Pasal 3 berisi tentang Kepolisian Republik Indonesia adalah sederajat dengan Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai unsur Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Pasal 5 tentang Kepolisian Republik Indonesia dikepalai oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang memegang

³⁶ Lihat Lampiran 8, Tentang Struktur Organisasi Polisi 1967, hlm. 132.

³⁷ Soeparno, *op.cit.*, hlm 387.

pimpinan teknis dan pengendalian Kepolisian Republik Indonesia serta bertanggung jawab tentang pelaksanaan tugas kewajibannya kepada menteri Pertahanan Keamanan atau Panglima Angkatan Bersenjata.³⁸

Selanjutnya dalam hal kepangkatan dari “Bhayangkara sampai Jenderal”.³⁹ Secara umum, pangkat polisi ada tiga tingkatan: Tamtama, Bintara, dan Perwira. Tamtama adalah pangkat terendah sedangkan Perwira adalah pangkat tertinggi dalam lembaga Kepolisian. Pangkat prajurit POLRI tersebut dapat berpengaruh pada kewenangan, karir, dan kesejahteraan, selain itu pangkat juga menunjukkan lamanya masa pengabdian, tingkat kemampuan, kompetensi, peran, dan jabatan.

³⁸ Lihat Lampiran 4, *op.cit.*, hlm. 126-127.

³⁹ Lihat Lampiran 6, Daftar Kepangkatan POLRI. hlm. 130.